

ANALISIS AKTOR KINERJA EKONOMI PUBLIK DAN KEBIJAKAN EKONOMI NEGERA PERSPEKTIF SYARIAH

Arna

Praktisi BMT Gunung Lerang

Email: arnamarsuki87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang aktor kinerja ekonomi publik dan kebijakan ekonomi negara dalam perspektif syariah. Para aktor atau pelaku ekonomi publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; penyelenggara Negara (*political Society*), dunia usaha, serta masyarakat madani (*civil Society*). Ketiga aktor tersebut memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi dalam suatu negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan melalui buku, artikel serta data-data tentang kebijakan ekonomi publik yang dikeluarkan oleh negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara Negara di Indonesia cenderung telah kehilangan ideology untuk mengatur dan mengurus warga, tanah, dan potensi kekayaan alam. Penyelenggara Negara bahkan tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan (*have to*), yang sebaiknya dilakukan (*should*), dan mana yang boleh dilakukan (*may*). Negara dalam mengatur ekonomi publik hendaknya dapat memisahkan kekayaan dan sumber daya alam Negara yang harus diatur dan dikelola sendiri oleh Negara melalui BUMN atau BUMD, serta kekayaan alam yang bisa dikelola oleh pihak pengusaha atau swasta.

Keywords : *Kebijakan Ekonomi, Kinerja ekonomi, Perspektif syariah*

PENDAHULUAN

Kinerja ekonomi publik suatu Negara dipengaruhi oleh perilaku aktor ekonomi di masyarakat. Aktor yang dimaksud di sini adalah para pelaku yang berperan strategis pada kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan publik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja ekonomi publik suatu Negara, dituntut peran optimal dari segenap pemain atau aktor tersebut. Dari seluruh aktor yang berperan dalam ekonomi publik, maka peran yang paling dominan berada pada penyelenggara Negara, khususnya di tangan pemerintah, karena pemerintahlah sebagai eksekutif yang mendapat “amanah” dari rakyat (sebagai pemilik Negara) untuk mengurus kesejahteraan bangsanya. Amanah yang dimaksud adalah amanah untuk menjalankan fungsi Negara, dalam bentuk kebijakan

ekonomi Negara yang berpihak pada kepentingan nasional, utamanya kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Bila amanah ini tidak dapat dijalankan dengan baik, misalnya gagal dalam menjalankan mencapai kesejahteraan publik, maka pemilik rakyat sebagai pemilik Negara tentu dapat mengganti pemegang kekuasaan yang tidak amanah tersebut melalui mekanisme pemilu atau mekanisme lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Kinerja (*performance*) ekonomi publik itu sendiri ditunjukkan oleh beberapa indikator yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersinergi dalam mencapai kesejahteraan publik. Indikator-indikator yang dimaksud adalah kebijakan Negara dari perspektif ekonomi publik, kinerja ekonomi publik dan proses pencapaiannya. Kinerja atau capaian kesejahteraan publik tidak terlepas dari kondisi atau keadaan pasar barang dan jasa, serta efektivitas peran penyelenggara Negara, khususnya pemerintah dalam mengatur dan mengelola (*rule and govern*) kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran penyelenggara Negara, khususnya pemerintah adalah pembuat dan pelaksana berbagai kebijakan ekonomi dan politik negara untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan publik secara berkelanjutan. Hasil kinerja ekonomi publik suatu Negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi di Negara tersebut, melalui suatu mekanisme atau aturan main (*rule of the game*) yang disepakati bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja ekonomi publik suatu Negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi di Negara tersebut, melalui suatu mekanisme atau aturan main (*rule of the game*) yang disepakati bersama. Secara umum para aktor atau pelaku ekonomi publik pada Negara yang beradab dan bermartabat serta demokratis, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara Negara (*political Society*)

Penyelenggara Negara lazimnya terdiri dari tiga pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. Agar penyelenggara Negara dapat

berjalan dengan baik, maka ketiga lembaga Negara tersebut dalam penyelenggaraan Negara berfungsi untuk saling menjaga keseimbangan (*check and balance*). Ketiga lembaga yang dimaksud adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kelompok penyelenggara Negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan main berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat melalui berbagai peraturan dan kebijakannya. Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara Negara berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya alam yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara Negara maka akan terbentuk iklim usaha (*business climate*) yang merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya. Dapat menghasilkan barang dan jasa, dan membuka lapangan kerja.

Eksekutif dan legislatif secara bersama-sama akan menentukan besaran serta alokasi dan distribusi sumber daya Negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah (APBN/D). Kebijakan mengenai besaran atau volume serta alokasi APBN, APBD ini digunakan untuk mempengaruhi atau merangsang aktivitas ekonomi publik. Kebijakan APBN ini dikenal juga dengan istilah kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dalam ekonomi makro.

2. Kelompok Dunia Usaha

Kelompok dunia usaha beroperasi dan berperan sebagai penghasil (produsen) barang dan jasa di masyarakat dengan tujuan mendapat laba dari usaha tersebut. Kelompok dunia usaha atau pelaku bisnis ini terdiri dari berbagai bentuk, berbadan hukum seperti PT, CV, Firma, dan koperasi, milik domestik, atau PMDN, milik asing atau PMA, milik Negara, BUMN dan BUMD, maupun yang tidak berbadan hukum.

Kelompok dunia usaha dalam melakukan kegiatan sebagai salah satu pelaku dalam ekonomi publik memiliki landasan hukum. Landasan hukum ini menjadi dasar dalam melakukan peranannya. Secara historis, istilah perusahaan berasal

dari hukum dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha, kemudian diakomodir dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Istilah perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan perdagangan. Namun demikian, beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai rumusan, (Mulhadi, 2010).

Dalam beberapa undang-undang juga ditemukan uraian mengenai definisi perusahaan, antara lain sebagai berikut;

- a. Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1992, tentang wajib daftar perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- b. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997, tentang dokumen perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kelompok bisnis adalah aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat nyata peranannya di lapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (*value added*) di tengah masyarakat. Dalam menjalankan segala bentuk usahanya maka diperlukan dukungan dari penyelenggaraan Negara melalui berbagai kebijakan dan aturan mian bisnis yang berlaku.

3. Kelompok Masyarakat Madani (*civil Society*)

Kelompok masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, maupun konsumen dari pelayanan yang disediakan oleh Negara. Masyarakat madani terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), NGO, asosiasi profesi, perguruan tinggi, organisasi massa, baik keagamaan maupun lainnya.

Dalam praktek sehari-hari di Negara demokrasi, kelompok madani adalah kelompok yang kritis sehingga kadang kala terlihat sebagai kelompok penekan (*pressure group*) bagi pihak lain. Berbagai masalah mengenai kepentingan publik secara luas sering diangkat ke permukaan untuk minta penyelesaian dan penyelenggara Negara, seperti masalah kesejahteraan masyarakat, masalah lapangan pekerjaan, masalah keadilan, masalah penegakan hukum di masyarakat, masalah lingkungan, perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, masalah kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Perilaku Aktor Ekonomi Publik (*public Economic Behavior*)

Kinerja ekonomi publik suatu Negara ditentukan oleh perilaku aktor ekonomi di masyarakat. Perilaku masing-masing aktor tersebut dalam berinteraksi di masyarakat dimotivasi atau diarahkan oleh kepentingan (*interest*) masing-masing. Oleh karena itu maka dalam prakteknya sangat mungkin terjadi tabrakan antar kepentingan, yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan baik yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dari ekonomi publik. Jika tabrakan (*crashed*) ini terus terjadi maka waktu dan tenaga bangsa ini akan banyak terbuang sia-sia untuk saling merebut kesempatan memperjuangkan kepentingan masing-masing kelompok, sehingga lupa pada kepentingan bersama, dan dapat mengakibatkan justru kepentingan asinglah yang justru terjadi, hal ini akan sangat merugikan bangsa dan Negara. Oleh sebab ini agar aktivitas ekonomi tidak saling bertabrakan antar satu sama lain maka diperlukan aturan main

dalam bentuk norma dan etika yang disepakati bersama. Dengan norma dan etika yang dipatuhi oleh setiap kelompok aktor, maka tabrakan kepentingan tidak akan terjadi, sehingga stagnasi ekonomi dapat dihindari.

Penyelenggara Negara sebagai salah satu produsen, konsumen terbesar dari barang dan jasa, serta pemegang amanah rakyat, maka rezim pemerintahan seharusnya menjaga kepentingan nasional. Pemerintah harus berperilaku menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas atau yang biasa disebut kepentingan publik, baik publik sebagai produsen maupun publik sebagai konsumen. Kelompok masyarakat produsen dan kelompok masyarakat sebagai konsumen terkadang terjadi hal yang berseberangan. Dimana produsen ingin menjual barangnya setinggi-tingginya demi memenuhi kebutuhan produksi serta mengejar laba yang tinggi. Sementara konsumen cenderung ingin membeli kebutuhan dengan harga murah yang dapat dijangkau. Dalam kondisi seperti ini, maka penyelenggara Negara harus menjadi fasilitator untuk menyelaraskan antara kepentingan kelompok tersebut. Untuk mengatur semua itu maka pemerintah diberi kekuasaan untuk membuat aturan main melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing, tanpa ada kelompok yang merasa dizalimi.

Indikator Kinerja Ekonomi Publik (*Performance Indicators Of Publik Economics*)

Secara umum kinerja dari ekonomi publik ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut berupa timbulnya balas jasa faktor produksi, balas jasa modal, kesempatan kerja, sewa dari pemanfaatan aset/faktor produksi yang tidak terpakai, surplus usaha serta nilai tambah sosial. Makin tinggi aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, maka akan semakin baik pula kesejahteraannya masyarakat di daerah tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dimana masyarakat punya pendapatan karena tersedianya pekerjaan. Negara bisa melayani masyarakat dengan memadai karena adanya APBN yang juga memadai.

Untuk menciptakan APBN yang memadai maka diperlukan aktivitas bisnis di masyarakat yang memadai pula.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu indikator ekonomi karena dari konsekuensi keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi. Dimana pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana, yang berarti pula harus mengeluarkan sejumlah dana/uang untuk mencapai tujuan pembangunan. Sementara itu untuk membiayai segala pengeluaran tersebut, pemerintah butuh masukan atau penerimaan dalam setiap periode tahun anggaran. Karena APBN sebagai indikator, maka peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional dapat diketahui. Melalui indikator-indikator dalam APBN, dapat dianalisis seberapa besar peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional Indonesia, (Eko Prasetyo, 2011).

Sejak orde baru, APBN Indonesia disusun melalui tiga prinsip APBN yaitu; prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis, dan prinsip anggaran fungsional. Namun sejak pemerintahan Gus Dur, hingga sekarang oleh menteri keuangan saat itu Bambang Subdibyo telah diganti dengan prinsip anggaran defisit (*budget defecit*), yaitu anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.

Prinsip anggaran berimbang (*balanced budhet*) artinya sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, dimana difisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan ditutup dengan bantuan/pinjaman/utang luar negeri, atau dalam APBN dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan. Sedangkan dalam prinsip anggaran dinamis ada dua pengertian yakni anggaran dinamis absolute dan anggaran dinamis relatif.

Indikator kinerja ekonomi publik dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan (*income*)

Aspek pendapatan (*income*) sebagai sumber nafkah memerlukan dua faktor penunjang utama, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar (internal maupun eksternal). Pekerjaan adalah sumber nafkah bagi masyarakat. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat akan meningkatkan jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator kinerja ekonomi publik. Makin tinggi angka pengangguran mengindikasikan kinerja ekonomi publik yang semakin buruk. Keberhasilan pemerintahan suatu Negara diukur antara lain dari seberapa kecil tingkat pengangguran yang terjadi pada masyarakatnya. Makin besar tingkat pengangguran maka menjadi indikator makin tidak berhasilnya suatu pemerintahan. Di sisi lain makin besar keterlibatan tenaga kerja dalam ekonomi nasional maka makin tinggi pendapatan domestik bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GNP). GNP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu Negara selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Ada tiga pendekatan dalam mengukur besarnya GNP, yaitu ; pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, nilai barang dan jasa akhir, serta dari pasar faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang dirumuskan dalam bentuk upah + bunga + sewa + keuntungan, (Mustafa Edwin, 2007).

Namun penggunaan GNP untuk mengukur pendapatan nasional kurang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Beberapa hal bisa disampaikan mengapa GNP kurang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa, yaitu:

- a. Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP.

- b. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat (*leisure time*), padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang akan semakin menginginkan waktu istirahat. Bahkan beberapa Negara maju mulai memikirkan waktu kerja yang lebih pendek. Ini berarti akan terdapat perbedaan yang semakin besar antara besarnya GNP dengan kesejahteraan. GNP cenderung nilainya lebih rendah daripada kesejahteraan.
- c. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan.
- d. Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air maupun udara. Ini akan merusak lingkungan, menyebabkan orang sekitar sakit, yang berarti berkurangnya kesejahteraan.

Dari empat contoh diatas cukup jelas bahwa GNP sungguh sulit digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yang sekaligus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Selain tersedianya lapangan pekerjaan, faktor lain yang menjadi pendukung pendapatan adalah stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar baik internal yang meliputi stabilitas harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi setiap hari, maupun secara eksternal (kurs). Bila pendapatan naik 10% , sementara harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari 10%, maka daya beli dari pendapatan konsumen tersebut akan menurun. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara Negara sangat tidak mungkin mendiktekan harga barang dan jasa serta kurs nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing kepada seluruh masyarakat. Pemerintah harus mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat melalui pengembangan bisnis, sehingga akan mendorong terciptanya keseimbangan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang dan

jasa di masyarakat yang akan membantu terbangunnya stabilitas harga. Makin berfluktuasi nilai tukar mengindikasikan kinerja ekonomi publik makin buruk.

2. Makin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa

Makin banyaknya konsumsi barang dan jasa di masyarakat menunjukkan masyarakat makin sejahtera. Faktor penunjang utama dalam menciptakan pilihan barang dan jasa yang makin banyak tersebut adalah investasi. Makin banyak investasi di berbagai sektor ekonomi akan menghasilkan makin banyak aneka barang dan jasa, sehingga jumlah pilihan konsumsi masyarakat juga bertambah. Ketersediaan barang dan jasa bukan hanya pada barang kebutuhan pokok jasa (primer), tetapi juga barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan (*supply*) barang dan jasa strategis seperti pangan dan energy merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kinerja ekonomi publik, karena berkaitan dengan kedaulatan dan ketahanan pangan (*national sovereignty and security on food*), serta kedaulatan dan ketahanan energi (*national sovereignty and security on energy*). Berkaitan dengan hal kedaulatan dan ketahanan pangan dan energi maka ada dua hal yang perlu dimiliki oleh Negara, yaitu:

- a. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas. Untuk itu maka diperlukan penyelenggara Negara yang memiliki keteguhan dalam prinsip, kuat integritas kebangsaanya, jujur, tegas, dan cepat dalam mengambil keputusan, tidak mudah dipengaruhi atau dikoptasi oleh berbagai kepentingan lain selain kepentingan nasional.
- b. Kecukupan pasokan yang memadai (*sufficient supply*), ini sangat berpengaruh pada ekonomi suatu Negara yang ditunjukkan oleh stabilitas harga barang dan jasa, tidak adanya frekuensi antrian dalam pembelian kebutuhan masyarakat. Kelangkaan barang akan mempengaruhi harga dalam masyarakat.

3. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

Untuk meningkatkan persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi utamanya berkait dengan pemenuhan kebutuhan anak negeri, dan bila ada pelaung menjadi ekspor ke luar negeri. Dengan demikian disamping kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi, di sisi lain pendapatan Negara (pajak dan retribusi) juga akan bertambah. Jika pendapatan Negara bertambah maka dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, transfortasi, dan pelayanan lainnya. Dengan perwujudan ini akan memperkuat persatuan serta mempercepat kemakmuran suatu bangsa, yang ditunjukkan oleh stabilitas harga barang dan jasa.

Jika pendapatan Negara meningkat, namun pelayanan publik tidak meningkat, pendidikan semakin mahal, jaminan kesehatan makin sulit, dan lain sebagainya. Menunjukkan adanya hal yang perlu dibenahi dalam bernegara. Apakah terkait dengan pejabat yang korupsi, atau kebijakan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

4. Meningkatnya investasi di masyarakat

Meningkatnya investasi akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan yang secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran. Terbukanya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan bertambahnya pendapatan asli masyarakat (PAM), berkurangnya kemiskinan, serta meningkatnya pendapatan Negara.

5. Membaiknya iklim usaha

Iklim usaha dapat merangsang munculnya usaha atau investasi. Oleh karena itu iklim usaha ini sangat berpengaruh pada keseimbangan investasi. Iklim usaha dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkait dan bersinergi satu sama lainnya dalam membangun suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah investasi, baik masyarakat sekitar lokasi, palaku investasi,

maupun pemerintah yang mewakili kepentingan Negara. Walaupun sumber daya investasi cukup tersedia, namun iklim usahanya tidak kondusif, maka pengembangan investasi tidak akan optimal.

Dengan iklim usaha yang kondusif, masyarakat pengusaha atau pemodal melihat harapan yang menjanjikan di masa depan, sehingga kepastian dari bisnisnya relative lebih tinggi. Iklim berusaha domestik yang menjanjikan yang terjadi di masyarakat, ditunjukkan oleh kemampuan penyelenggara Negara dalam menegakkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga berdampak positif pada intensitas aktivitas ekonomi di masyarakat.

6. Makin berdayanya Negara secara ekonomi, politik, maupun sosial

Bila pengelolaan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dapat dilakukan dengan baik, maka seyogyanya makin besar keberdayaan atau kemampuan masyarakat dan Negara di bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kemampuan Negara untuk melayani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan jaminan sosial yang dibutuhkan berbagai kelompok masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian akan mendorong tingkat kemandirian (relatif) bangsa yang selanjutnya digambarkan oleh berkurangnya ketergantungan bangsa ini terhadap luar negeri.

Kemandirian relatif ekonomi bangsa ini bukan berarti tidak perlu berhubungan dengan luar negeri, tapi lebih ditunjukkan oleh kedaulatan atau tingginya daya tawar (*bargaining position*) bangsa bila bertransaksi dengan bangsa lain. Kebijakan ekonomi nasional tidak terdeteksi oleh asing, baik lembaga internasional maupun kelompok atau salah satu Negara kuat lainnya.

7. Konsistensi indikator mikro dan makro ekonomi (*consistency of economic indicators*)

Yang dimaksud dengan indikator makro adalah petunjuk mengenai kejadian atau besaran kinerja ekonomi secara makro. Begitu juga dengan indikator

ekonomi secara mikro adalah besaran atau kejadian yang terjadi pada ekonomi tingkat mikro. Indikator ekonomi secara mikro adalah pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan investasi usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas usaha kelancaran arus dana perusahaan, dan lain sebagainya. Konsistensi dari indikator mikro dan makro sebenarnya lebih menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara, sehingga dengan demikian akan mengurangi aktivitas penyelenggaraan Negara yang tidak perlu.

8. Makin kuatnya ketahanan ekonomi masyarakat

Ketahanan ekonomi masyarakat pada hakikatnya adalah kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan (*sustainability of public welfare*). Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ditopang oleh tersediannya kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup di era globalisasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi yang semakin maju. Negara sedang berkembang (NSB) dihadapkan pada masalah-masalah dan tantangan ekonomi politik dan pembangunan yang bisa menjadi peluang maupun ancaman. salah satu peluang dan ancaman adalah Industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi. Untuk mengejar ketertinggalanya, Negara Sengah Berkembang (NSB) menyusun strategi ekonominya masing-masing. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melakukan proses industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun di tengah gencarnya proses industrialisasi, Negara Sengah Berkembang (NSB) pun dihadapkan pada masalah-masalah yang timbul dari industrialisasi itu sendiri, seperti masalah *skill* tenaga kerja yang kurang memadai, dan juga muncul masalah-masalah dari sektor pertanian yang notabene merupakan *basic* ekonomi sebagian besar Negara Sengah Berkembang. Kemudian, karena industrialisasi umumnya disertai oleh

urbanisasi. Maka, problemnya adalah terjadi proses informalisasi perekonomian, (Didin S. Damanhuri, 2012).

Salah satu konsep untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia adalah sistem pertanian. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia utamanya di desa memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Oleh karena itu kebijakan harus di dorong kepada pembangunan sektor pertanian. Baik infrastruktur maupun SDM para petani itu sendiri. Sektor pertanian dapat menjadi sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang berasal dari tabungan yang diinvestasikan adalah tabungan yang berasal dari pendapatan. Di Negara-negara miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap Gros Nasional Produk (GNP) mencapai 50 %. Separuh dari produk nasional disumbangkan dari sektor yang lain terutama sektor industri dan perdagangan (barang dan jasa), sektor ini penting sebagai penyumbang tabungan yang kemudian digunakan untuk investasi, (Subandi, 2012).

Skala Prioritas Kebijakan Ekonomi Negara

Agar kebijakan ekonomi Negara dapat memberikan dampak yang optimal bagi kegiatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu perencanaan dan program ekonomi Negara dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan kepentingan. Baik dalam skala sektoral (pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain), maupun regional (wilayah). Dengan demikian perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan parameter prioritas

Parameter prioritas yang perlu mendapat pertimbangan antara lain, sebagai berikut;

- a. Tingkat kegawatan (*seriousness*) dari besarnya dampak negatif bila kebijakan ekonomi negara tersebut ditunda, misalnya kebijakan ekonomi Negara menyangkut lapangan kerja, menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan, serta menyangkut kedaulatan dan ketahanan energi.

- b. Tingkat kemendesakan kebutuhan (*urgency*) suatu kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian nasional. Dengan kata lain berapa lama masyarakat bisa sabar menunggu kebijakan agar berbagai masalah mendesak dapat segera diselesaikan. Misalnya kebijakan ekonomi Negara menyangkut pembangunan sarana transportasi publik perkotaan, menyangkut pembangunan prasarana transportasi publik antar pulau, menyangkut transportasi massal baik di perkotaan maupun antar kota, serta menyangkut transportasi laut antar pulau di Indonesia.
- c. Perkembangan dampak negative (*trend*) dari suatu masalah, bila tidak ada kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah untuk mengatasinya. Misalnya kebijakan Negara menyangkut perdagangan luar negeri yang berpihak pada kepentingan nasional, menyangkut pembangunan merek nasional (*national brand dan national flag*) di pentas internasional.
- d. Menetapkan persyaratan (*conditional*) atau kriteria untuk proyek atau kegiatan ekonomi prioritas agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan optimal. Penetapan kriteria harus realistis terukur dan transparan, sehingga mudah diminati oleh seluruh pemangku kepentingan. Ada dua jenis persyaratan yang perlu disiapkan dan sejumlah prosedur yang harus dilalui sebagai berikut :
 - Persyaratan mutlak (*IFF, atau If and Only If, Cinditon*), yaitu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proyek yang bersangkutan. Bila tidak maka proyek atau kegiatan tersebut dibatalkan.
 - Persyaratan tambahan bila memungkinkan, yaitu adanya kriteria keinginan untuk proyek yang bersangkutan agar manfaat lebih optimal, namun bila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberadaan proyek atau kegiatan ekonomi tersebut.
 - Mengembangkan alternatif atau pilihan, yaitu menyusun berbagai alternatif dari suatu proyek yang akan dipilih.

- Menyaring alternatif dengan persyaratan mutlak, yaitu dilakukan penjumlahan bobot berdasarkan persyaratan mutlak dari berbagai alternatif proyek.
- Membandingkan alternatif berdasarkan persyaratan tambahan, yaitu dilakukan penjumlahan bobot berdasarkan persyaratan tambahan dari berbagai alternatif proyek.
- Menentukan pilihan sementra, yaitu dilakukan penjumlahan bobot berdasarkan persyaratan mutlak dan persyaratan tambahan dari berbagai alternatif proyek, sehingga akan didapat urutan dari jumlah bobot masing-masing alternatif.
- Mengkaji masalah potensial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan, yaitu perlunya dilakukan kajian mengenai berbagai persoalan /penyimpangan yang mungkin muncul. Munculnya persoalan in dapat terjadi pada saat pembangunan proyek, atau pada kegiatan operasi proyek.
- Memilih proyek investasi atau kegiatan ekonomi publik yang akan dilaksanakan, yaitu dipilihnya proyek berdasarkan gabungan dari bobot persyaratan mutlak dan persyaratan tambahan yang paling tinggi dengan masalah potensial yang paling kecil.

2. Kebijakan Negara di Bidang BUMN dan BUMD Untuk Kesejahteraan Rakyat

Walaupun peran penyelenggara Negara (pemerintah) tidak langsung terlihat dalam aktivitas ekonomi di masyarakat, namun demikian peranannya sangat strategis, penting, dan dominan dalam menentukan kinerja ekonomi masyarakat atau kinerja ekonomi publik. Penyelenggara Negara idealnya tidak ikut bermain dalam kegiatan ekonomi bilamasyarakat sudah mampu menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan. Namun demikian untuk Negara berkembang seperti indonesia, di mana masyarakat masih dalam proses berkembang, maka keterlibatan Negara dalam aktivitas ekonomi nasional untuk menghasilkan dampak optimal bagi kesejahteraan

masyarakat adalah suatu kewajiban. Apa pun keikutsertaan Negara dalam aktivitas ekonomi publik, maka tolak ukurnya adalah sepanjang menguntungkan masyarakat dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Jika Negara ikut serta dalam aktivitas ekonomi publik maka hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003) yang diundangkan serta mulai berlaku pada 19 Juni 2003. Kehadiran undang-undang ini menggantikan tiga undang-undang sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.¹

Pengertian pemisahan kekayaan Negara berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2003, tentang BUMN mempunyai arti sebagai berikut; Yang dimaksudkan dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.²

Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroaan terbatas adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Dalam menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kerugian usaha ini, kedudukan pemerintah tidak dapat berposisi sebagai badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai badan hukum publik adalah *bestuurszorg*, yaitu tugas yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dan suatu konsep Negara hukum modern memerhatikan kepentingan seluruh rakyat.

¹Op. chit, Mulhadi, h. 151

² Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan publik dalam perspektif hukum, teori, kritik, dan praktik*, (PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta : 2009), h. 115

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan tentang aktor ekonomi, kinerja ekonomi pblik serta kebijakan ekonomi. Analisis dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi tentang data yang ada. Metode tersebut digunakan guna menggambarkan dan menginterpretasikan isi atau substansi dari peran para aktor ekonomi kebijakan publik dalam mendorong perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam negeri, serta kepentingan pihak asing. bahkan Bila kepentingan asing pada kehidupan berbangsa dan bernegara makin lama maki terlihat menonjol dibandingkan kepentingan nasional dan kepentingan publik, faktor utama yang menyebabkan adalah lemahnya kepemimpinan dari pemerintah tersebut. Bila ini terjadi secara terus menerus maka kedaulatan Negara menjadi kedaulatan semu, hanaya menjadi jargon belaka.

Keseimbangan kepentingan berbagai kelompok masyarakat juga dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing kelompok masyarakat. Kelompok ini sangat berpengaruh pada kinerja ekonomi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada prakteknya untuknya mencapai keseimbangan kepentingan antar kelompok tidak jarang kita disusupi oleh kepentingan asing, atau memakai kekuatan asing untuk kepentinganya kelompoknya, sehingga kepentingan domestic dan kepentingan nasional terabaikan sehingga kesejahteraan rakyat hanya menjadi jargon kampanye para politikus dalam berebut kekuasaan, namun kesejahteraan rakyat masih jauh dari kenyataan. Maka diperlukan kepedulian antar sesama anak bangsa, atau lebih dikenal dengan istilah etika berbangsa dan bernegara. Adanya rasa senasib sepenanggungan, atau nasionalisme yang menjadi modal membangun kesejahteraan bersama yang berdaulat dan bermartabat sehingga dihormati dan disegani.

Kebijakan publik di Negara demokrasi seperti Indonesia, maka tidak bisa lepas dari tiga unsur penting dalam penyelenggara Negara yaitu eskeskutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif sebagai perencana dan pengambilan keputusan dalam suatu Negara, legislatif sebagai pengawas dan pembuat aturan main, serta yudikatif sebagai kelompok yang menjadi penegak hukum agar dalam berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Ketiga elemen tersebut harus selalu bersinergi untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Indonesia sebagai penganut demokrasi yang berdasarkan Undang-undang 1945 sampai hari ini belum mampu menjalankan amanah yang terkandung di dalamnya secara utuh dan berkesinambungan.

Pembangunan dalam Suatu Negara tidak akan berjalan tanpa sebuah pengelolaan keuangan yang baik. Di Negara indonesia pengelolaan keuangan dilakukan melalui APBN yang bersumber dari pajak. Penyelenggaran Negara dalam hal ini pemerintah melakukan penarikan pajak kepada setiap masyarakat sesuai undang-undang atau aturan main yang telah ditetapkan. Pajak kemudian dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya manusia. inilah yang menjadi slogan bagi Negara demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu parameter keberhasilan pemerintah atau ukuran kinerja suatu pemerintah adalah pengelolaan ekonomi publik, yang indikatornya adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan yang benar akan selalau berusaha optimal untuk mencapainya. Pemerintah sebagai bagian terpenting dari penyelenggara Negara berperan sebagai dinamisator dan regulator sekaligus sebagai fasilitator dari perekonomian nasional, berfungsi untuk menjaga kesejahteraan publik.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia serta penarikan pajak yang begitu besar, maka selayaknya masyarakat akan hidup makmur. Ketimpangan, pengangguran, kemiskinan akan mudah untuk diatasi. Namun kenyataannya justru sebaliknya, ketimpangan masih terjadi dimana-mana, kemiskinan masih terjadi di setiap sudut kota negeri ini. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka dapat dikemukakan

bahwa ada kekeliruan tentang pengambilan kebijakan terutama pada pengelolaan keuangan Negara ini. Kenyataan memperlihatkan bahawa para penyelenggara Negara hari ini menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi serta kelompok mereka masing-masing. Mereka bekerja atas dasar kepentingan, bukan atas dasar ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Padahal semua yang ada dalam dunia ini hanyalah sementara, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya titipan dari Allah swt kepada manusia sebagai makhluk pilihan untuk menjadi khalifah.

KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi Negara yang disusun dan dijalankan pemerintah sebagai penyelenggara Negara sangat menentukan tercapainya kinerja ekonomi publik yang diharapkan. Para aktor melaksanakan aktivitasnya dimotivasi oleh kepentingan masing-masing yang tidak jarang berbeda satu sama lain. Kepentingan masing-masing aktor akan mempengaruhi perilaku dalam berinteraksi di publik. Dengan demikian, maka untuk menjaga perilaku tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan publik, maka perilaku dari para aktor ekonomi publik daitur dengan undang-undang yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Ada tiga kecendrungan negatif yang berkembang mengenai hubungan antara penyelenggara Negara dalam pembangunan ekonomi publik melalui instrument investasi saat ini.

1. Penyelenggara Negara di indonesia cenderung telah kehilangan ideology untuk mengatur dan mengurus warga, tanah, dan potensi kekayaan alam. Penyelenggara Negara bahkan tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan (*have to*), yang sebaiknya dilakukan (*should*), dan mana yang boleh dilakukan (*may*). Seharusnya Negara dapat memutuskan mana kekayaan dan sumber daya alam Negara yang harus diatur dan dikelola sendiri oleh Negara melalui BUMN atau BUMD. Keputusan terkadang tidak ditentukan oleh nilai yang mengarahkan pada cita-cita berdirinya Negara, melainkan pada kepentingan segelintir orang (elite) yang

sangat berambisi mengambil manfaat dari Negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

2. Pemerintah belum mampu menciptakan mesin birokrasi Negara yang efisien untuk menggerakkan semua bidang kehidupan. Berkembangnya investasi dan pembangunan ekonomi publik hanya mungkin dilakukan jika birokrasi Negara bersih, efisien, transparan, akuntabel dan efektif.
3. Negara masih sangat membutuhkan birokrasi yang memudahkan, bukan birokrasi yang selalu menyulitkan dan mencari kesempatan bagi kepentingannya. Indonesia membutuhkan birokrasi yang memberdayakan, bukan sebaliknya birokrasi yang melemahkan. Tidak tumbuhnya investasi dan kegagalan pembangunan ekonomi rakyat salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan Negara untuk merevitalisasi birokrasi menuju birokrasi yang professional dan handal.

Daftar Pustaka

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan publik dalam perspektif hukum, teori, kritik, dan praktik*, (PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta: 2009)
- Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan, teori, kritik, dan solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2012)
- Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Beta Offset, Yogyakarta, 2011)
- Mulhadi, *hukum perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, (ghalia indonesia, bogor 2010)
- Mustafa Edwin Nadution dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Pranada Media Group, Jakarta: 2007)
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 148